

Forum Freedom 35, 16 Januari 2006

Tema: Desentralisasi & Korupsi

Nara sumber : Anies R. Baswedan

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom...

Hamid Basyaib (HB)

Selamat pagi saudara dan anda berjumpa lagi dalam Forum Freedom, masih bersama saya Hamid Basyaib (HB). Acara ini kerjasama antara Freedom Institute dan Radio 68H dan disiarkan ke sekitar 50 radio lain di seluruh Indonesia. Tamu saya pagi ini adalah Dr Anis Baswedan (AB). Selamat pagi Nis..

Dr Anis Baswedan (AB)

Selamat pagi..

Hamid Basyaib (HB) :

Dia sudah muncul beberapa kali dan beberapa kali juga ngomong tentang desentralisasi dan pagi ini juga kami akan ngobrol tentang desentralisasi tapi khusus mengenai aspek korupsinya. Begini ceritanya ya, kita, dua-tiga kali sebelumnya sudah ngomong aspek-aspek politiknya. Bagaimana desentralisasi berkembang, dan apa saja tantangan dan peluangnya. Peluangnya besar misalnya bahwa manajemen daerah bisa berkembang baik dan lalu partisipasi pasti lebih tinggi karena dekat dengan kekuasaan. Bukannya ke Jakarta yang terlalu jauh dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada juga Korupsi yang disebut sudah makin marak juga. Dua-Tiga minggu lalu kita sudah menyinggung tentang ini bahwa korupsi itu makin marak sejalan dengan lanjutnya proses desentralisasi atau otonomi daerah. Dan Anda, kalau tidak salah setuju bahwa memang benar korupsi juga meningkat. Saya tidak tahu, mungkin saya keliru. Nah, Apakah betul Nis, Pertanyaannya adalah apakah betul desentralisasi juga meningkatkan peluang korupsi?

AB:

Saya akan menjawab ini dua tahap. Pertama di tingkat ide. Di tingkat ide itu ada dua *conflicting ide*. Satu menilai dengan adanya desentralisasi maka jarak antara rakyat dan pemerintah menjadi dekat. Proses pengawasan masyarakat menjadi lebih baik, transparansi menjadi lebih meningkat. Dengan demikian korupsi akan lebih rendah, itu satu argumen. Argumen kedua mengatakan bahwa desentralisasi membuat kekuasaan ada di tangan elite lokal. Elite-elite lokal ini akan melakukan pilihan-pilihan kebijakan dan aliansi-aliansi strategis yang menguntungkan dirinya. Dengan begitu akan terjadi potensi korupsi yang lebih tinggi di daerah. Jadi ada dua argumen. Ada dua tokoh menarik dalam kajian ini, Gurgur dan Syah Anwar. Beliau banyak mengkaji tentang Indonesia. Dia melakukan studi di lebih dari 30 negara yang melakukan desentralisasi, mencoba menjawab dua konsep yang berbeda itu.

HB:

Sejak periode kapan itu? Sejak tahun 70-an atau ...

AB:

Desentralisasi itu populernya sejak 60-an ke atas ya. Kesimpulan dia desentralisasi mengurangi praktek korupsi. Jadi agak counter faktual,

agak melawan persepsi umum bahwa desentralisasi itu membuat korupsi menjadi lebih marak.

HB:

Ok. Itu teoritis atau empiris?

AB:

Empiris.

HB:

Empiris di negara lain?

AB:

Empiris di negara lain tidak termasuk Indonesia, karena Indonesia belum desentralisasi.

HB:

Nah, ada nggak data untuk Indonesia?

AB:

Untuk Indonesia, datanya dari saya saja karena saya melakukan penelitian sendiri tentang itu. Sebenarnya saya tidak langsung menanyai soal satu-persatu tentang korupsi. Tidak. Tapi bagaimana efeknya korupsi di tingkat dua. Tapi begini, sebelum bicara tentang korupsi itu sendiri, kita harus pahami bahwa korupsi ini terkait dengan masyarakat, terutama di tingkat dua. Jadi kalau tingkat toleransi masyarakat terhadap korupsi itu tinggi, maka potensi untuk munculnya official yang korup itu lebih tinggi. Jadi tidak hanya satu sisi pak Hamid. Tidak hanya satu sisi maksudnya begini, kalau pemerintah itu korup di tempat masyarakat yang tidak mau mentoleransi korupsi maka tidak akan survive. Jadi kita tahulah itu berimbas banyak. Saya menggunakan survey yang dilakukan di 177 kabupaten.

HB:

Jadi hampir separuh ya?

AB:

Ya, itu jumlah. Tapi sekarang kita ada 460-an. Dengan total responden 6700, artinya apa?

HB:

Besar sekali.

AB:

Itu margin of errornya sudah sangat minimum. Di sini 13 % dari publik itu melihat bahwa praktek korupsi, uang sogok, permintaan uang extra itu sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima dan perlu ditolak.

HB:

Ini semua dalam konteks otonomi daerah?

AB:

Ya. Otonomi daerah. Hanya 13% yang bilang tidak mau/ menolak, tidak mentolerir korupsi. Sisanya ya tidak setuju tapi ok lah. Artinya 87% toleran. Ya daripada repot-repot ok lah. Jadi toleransi kita tinggi. Bukan kita mendukung korupsi, ini berbeda, mentolerir adanya praktek korupsi.

HB:

Karena keterdesakan. Kalau saya misalnya mengurus KTP, bikin SIM susah ya sudah bayar saja.

AB:

Nah, itu 87% yang menyatakan begitu. Point saya adalah ketika desentralisasi itu dilakukan dengan sendirinya potensi munculnya korupsi itu akan tinggi. Tapi harus diperhatikan ketika kita melihat korupsi begini, range waktunya itu berapa lama. Kalau range waktu yang kita gunakan dalam analisis itu 5 tahun, tentu saja. Karena *institutional development* di tingkat lokal itu baru saja terjadi. Tapi kalau kita mencoba mengkajinya dengan waktu yang lebih panjang saya kira *institutional development* di tingkat lokal itu punya power yang lebih tinggi dibanding di Jakarta dalam menghentikan korupsi.

HB:

OK. Sekarang, kapan penelitian Anda ini terjadi?

AB:

Dilakukan sampai 2004.

HB:

Jadi..

AB:

Lima tahun kesimpulan, ya memang. Ada praktek ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hanya kita jangan berhenti di situ. Saya pun dalam kesimpulan saya mengatakan kita harus melihat *institutional design*-nya itu bergerak ke arah positif atau tidak. Maksudnya apakah ada aturan-aturan main di tingkat daerah yang muncul dan berpotensi untuk meningkatkan pengawasan pada pemerintah. Nah ini terjadi

HB:

Walaupun persepsi publiknya justru sebaliknya. Artinya Perda-Perda yang saling bertentangan itu, katanya ada sampai 7000-an dan berlawanan terutama dengan peraturan yang lebih tinggi, Undang-Undang atau aturan pusat. Persepsi umumnya justru untuk memperpanjang mata rantai perijinan dan itu adalah sumber korupsi. Itu benar/tidak?

AB:

Ya, sebentar. Penelitian saya ini dilakukan sebelum pemilu. Sebelum pemilihan PILKADA maksud saya. PILKADA itu satu termin point yang harus diperhatikan dalam memberantas korupsi. Mengapa termin point karena begini. Di tingkat publik itu ada keresahan-keresahan publik seperti yang dikatakan Hamid tadi. Publik merasa biaya-biaya extra itu macam-macam sekali. Mulai dari KTP sampai pengurusan ijin kerja, semuanya itu ada biaya ekstranya. Dan itu di banyak tempat menjadi agenda bupati-bupati baru. Saya melihat hal-hal yang berinteraksi langsung dengan masyarakat itu pelan-pelan akan hilang. Tidak mengatakan korupsi yang halus, yang tersembunyi itu akan hilang, tapi korupsi yang langsung berhubungan dengan masyarakat itu akan hilang. Ini yang saya maksud dengan *institutional design*. Jadi perubahan transfer mandat dari tubuh DPR ke Rakyat itu merubah perilaku eksekutif di tingkat daerah. Nah ini yang terjadi sesudah PILKADA. Ini jalan pelan-pelan, Hamid. Satu sisi kita sudah punya pemilihan langsung.

HB:

Itu sudah kemajuan besar.

AB:

Ya. Maka akan ada agenda *direct services*, pelayanan-pelayanan langsung kepada publik yang akan dipangkas biaya aneh-anehnya karena

itu langsung meresahkan publik. Kalau soal tender, proyek-proyek mungkin belum masuk agenda sekarang. Karena itu bagian dari *reimbursement* atas investasi pendukung-pendukung calonnya. Tapi saya kira *direct services* itu akan muncul dalam jangka pendek ini. Nah, fase yang kedua yang dapat kita amati..

HB:

Maaf, sebentar. Sebelum ke situ, anda punya data nggak bahwa ada kecenderungan kemungkinan hal itu akan terjadi di tempat-tempat lain.

AB:

Ya. Dan inilah yang ingin dibuktikan oleh Gurgur dan Anwar. Jadi ketika desentralisasi itu pada fase administratif tidak terlalu banyak perubahan tapi ketika desentralisasi pada fase politik yang biasa disebut devolusi. Devolusi artinya orang yang berkuasa di tingkat lokal tidak dipilih oleh orang pusat. Ketika dia dipilih lokal dia dipertanggungjawabkan lokal maka mendadak muncul pergeseran. Jadi kalau dulu pertanggungjawaban muncul dua tahap. Pertama dari eksekutif ke *elected official* yaitu orang-orang di DPR. Dari orang-orang DPR ke publik. Karena itu dipangkas maka dari eksekutif langsung ke publik. Nah, ini keresahan-keresahan publik diaddress jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat bukan berarti korupsi internal eksekutif hilang. Tapi hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak biasanya akan dipangkas itu. Nah, ini kenapa saya menjadi lebih optimis mengenai pemberantasan korupsi karena design itu begitu. Nah, yang kedua jarak itu tidak dapat dipungkiri merupakan faktor besar.

HB:

Jarak apa yang Anda maksud?

AB:

Jarak antara publik dengan koruptor. Kalau korupsi di Jakarta, serusak-rusaknya namanya dia, itu pasti lingkungan tetangganya masuk yang 87% yang toleran itu.

HB:

Nggak kenal sama sebelahnya juga mungkin ya?

AB:

Nggak kenal juga. Tapi kalau di daerah, baru kita menyaksikan anggota DPR ke Mesir saja, pulang itu panik, bisa bayangkan kalau di daerah. Begitu terjadi korupsi, lingkungan sekitarnya yaitu tetangganya itu akan memberikan pressure yang sedemikian besar dan itu empiris. Ini bukan ilusi ini, bukan cuma ilustratif saja. Di India begitu, kasusnya Karnataka. Di Karnataka official yang korup itu stress, bukan dianya tapi keluarganya. Jadi pressurenya tinggi. Di Brasil juga begitu. Jadi saya melihat ada kasus-kasus yang membuktikan dalam jangka menengah saja, tekanan terhadap orang-orang yang korup di tingkat daerah itu lebih tinggi. Jadi meskipun sekarang kita menyaksikan ada semacam kebebasan orang berkorupsi di tingkat daerah yang luar biasa, orang mengeluhkan ini, desentralisasi apa ini, desentralisasi korupsi. Ya benar saja terjadi pada..

HB:

Pada tahap ini.

AB:

Ya. Pada tahap ini. *But please*, kalau kita menilai demokrasi, melihat desentralisasi, tolong *spend* waktunya ditambah ini.

HB:

Berapa tahun?

AB:

Nah, kalau saya ketemu berapa tahun ini, wah pertanyaan *one million question* ini.

HB:

Ok. Nanti kita lanjutkan. Saudara kita istirahat sebentar nanti kita kembali lagi. Saya lupa memperkenalkan. Dr. Anis Baswedan ini kebetulan desertasinya tentang desentralisasi. Jadi dia cukup fasih berbicara. Dan penelitian yang dikutipnya tadi merupakan bagian dari penelitian untuk desertasinya. Anda masih bisa berinteraksi atau SMS ke 021-70497497. Sebentar lagi Forum Freedom akan kembali.

IKLAN

HB:

Selamat pagi lagi saudara, anda masih bersama saya Hamid Basyaib dalam Forum Freedom dan tamu saya yang sama dengan tadi yaitu Dr. Anis Baswedan. Tadi dia ngomong sangat optimistis tentang desentralisasi kaitannya dengan korupsi. Intinya desentralisasi itu berkorelasi negatif dengan korupsi. Artinya semakin terdesentralisasi suatu daerah seperti negara kita sekarang, dia yakini korupsi akan turun. Dan itu adalah hasil penelitiannya Gurgur, Anwar dan kawan-kawan di lebih dari 30 negara. Jadi Anis Baswedan sangat optimistis bahwa korupsi akan semakin berkurang seiring dengan mantapnya proses desentralisasi. Nah, kalau saya ulangi pertanyaan, kira-kira berapa tahun pengurangan itu akan nampak signifikan. Ketika kita bisa menetapkan terjadi pengurangan signifikan. Itu prediksi anda kira-kira berapa tahun?

AB:

Saya kira dua pemilu.

HB:

10 tahun ya.

AB:

Ya. Jadi pemilu pertama itu akan menjadi pelajaran awal bagi publik. Pemilu kedua, publik sudah mulai melakukan *reward* dan *punishment*.

HB:

Nis, kenapa ukuran Anda pemilu. Karena apa?

AB:

Ya karena proses pertanggungjawaban eksekutif yang menjalankan pemerintahan tingkat daerah itu dipotong dari Eksekutif ke Legislatif baru Legislatif ke rakyat. Sekarang Eksekutif ke Legislatif itu sudah tidak ada lagi. Eksekutif langsung ke rakyat melalui pemilihan kepala daerah (PILKADA). Nah, penyelenggaraan PILKADA ini menjadi arena dimunculkannya agenda-agenda lokal sebagai salah satu konsen yang paling utama. Itu masalah KTP, AKTA Kelahiran, lalu Kepala Keluarga, di luar masalah-masalah kesejahteraan, tapi menyangkut masalah birokrasi itu sangat krusial dan kita masih lemah dan korupsi di situ masih sangat tinggi. Itu bagi politisi-politisi yang mencoba *running* di posisi-posisi kunci, dijual. Bahwa mereka maju untuk membereskan ini, untuk membereskan itu. Mereka itu memandang sebagai problem, menjadi konsen banyak orang. Berharap itu selesai dalam satu pemilu, tidak mungkin. Karena itu cara melihat kapan beresnya ya dua pemilu.

Dari dua pemilu itu mudah-mudahan ada perubahan yang positif. Karena *design institusional* berubah, berubah sekali.

HB:

Artinya lewat pemilu orang belajar. Misalnya, ada politisi baru yang janji-janji akan mengubah itu. Tapi setelah duduk, tidak jadi. Itu menjadi hal yang bisa dikoreksi pada pemilu-pemilu berikutnya. Begitu ya.

AB:

Itu yang membuat saya rasa Proses desentralisasi ini lebih menguntungkan untuk pemberantasan korupsi. Di sini juga kita harus perhatikan pemberantasan korupsi perlu dilakukan di tingkat daerah. Upaya-upaya itu, jadi tidak menjadi aktifitas lintas tingkat.

HB:

Maksudnya apa ini?

AB:

Jadi pemberantasan korupsi kabupaten dilakukan tingkat propinsi. Pemberantasan korupsi propinsi dilakukan tingkat pusat. Karena ketika pertanggungjawaban itu tidak lagi dalam unit yang sama maka proses pengawasannya menjadi lemah. Bagaimana tim perbaikan untuk mengontrol praktek di tingkat kabupaten justru orang pusat atau propinsi? Sulit.

HB:

Jaraknya terlalu jauh. Maksud Anda kalau misalkan korupsi terjadi di tingkat II, seluruh mekanisme tingkat dua saja yang menanganinya?

AB:

Betul. Nah, di situ juga yang membuat efek dari korupsi atau citra negatif korupsi itu menyebar di tingkat kabupaten yang sama. Efeknya akan besar itu.

HB:

Nah, Nis kita bicara tentang, kita khususnya memang, desentralisasi dan korupsi naik atau turun. Kesimpulan kita adalah dengan desentralisasi ini korupsi akan menurun. Kalau hilang nol, tidak akan pernah terjadi dimanapun. Itu masih ada, kita mengerti itu. Nah, sekarang pertanyaannya Nis, lalu di mana peran pemerintah pusat dalam konteks pemberantasan korupsi di tingkat daerah?

AB:

Ya. Satu dalam menyebarkan visi perlunya gerakan anti korupsi. Jadi bisa karena dia yang punya akses ke media massa, jalur-jalur pengganda informasi yang luar biasa. Jadi kalau presiden SBY mengatakan kita akan habisi korupsi, kita akan serius perangai korupsi, itu virusnya akan menyebar ke tingkat lokal. Tapi pemerintah pusat tidak perlu melakukan intervensi ke tingkat bawah, ke propinsi atau ke kabupaten.

HB:

Intervensi dalam arti administratif. Maksud anda dia cuma perlu memberikan himbauan politik?

AB:

Satu himbauan politik. Kedua menyebarkan semangat untuk melawan korupsi dan itu gemanya kuat ke bawah. Ini di bawah harus *back-up* sendiri, harus ditangkap oleh kalangan di tingkat kabupaten, di tingkat propinsi. Nah, ini yang bisa diperankan oleh pemerintah. Tapi

saya tidak terlalu sepakat dengan keinginan untuk mendirikan lembaga pemberantasan korupsi atau komisi pemberantasan korupsi.

HB:

Di tingkat pusat.

AB:

Di tingkat pusat untuk menangani urusan pusat. Tapi kalau tingkat pusat untuk menangani urusan daerah ini potensi korupsi.

HB:

Dan tidak sesuai juga ya dengan semangat desentralisasi.

AB:

Jadi proses pemberantasan korupsi harus terdesentralisasi juga. Jadi begitu kira-kira.

HB:

Lalu apa, kalau studinya Gurgur dan Anwar itu memang juga tidak menyinggung-nyinggung pemerintah pusat ya.

AB:

Tidak. Di sana mereka membagi berdasarkan jenis negaranya. Ada negara yang federal ada negara yang kesatuan, mana yang lebih sukses. Dan ternyata negara kesatuan.

HB:

Yang sukses?

AB:

Yang sukses *mentackle* korupsi. Jadi desentralisasi di negara kesatuan itu lebih berpotensi memerangi korupsi daripada desentralisasi di negara federal.

HB:

Kenapa itu?

AB:

Salah satu yang obias adalah begini. Ketika sistem federal bedanya dengan kesatuan, itu di tingkat konstitusinya saja ada proteksi sub-national. Jadi pemerintahan propinsi punya perlindungan di konstitusi yang tidak bisa diintervensi oleh pusat. Sementara di negara kesatuan tidak ada proteksi semacam itu. Sehingga pemerintah pusat itu bisa intervensi. Nah, dalam konteks ini ketika pemerintah melakukan desentralisasi maka transfer otoritas dari pusat ke daerah di negara kesatuan biasanya lebih luas dibanding di negara federal. Karena negara federal itu kan sudah punya otoritas. Berangkatnya saja sudah mulai otoritas

HB:

Jadi, sebetulnya negara federal itu, dalam konteks daerah yang lebih kecil menjadi pemerintah pusat juga.

AB:

Betul. Sementara di negara kesatuan, transfer itu terjadi benar-benar. Ternyata efeknya lebih besar. Bahkan di kesimpulannya mereka mengatakan bahwa negara kesatuan itu lebih berpotensi memerangi korupsi kalau desentralisasi dilaksanakan. Nah, sekali lagi desentralisasi di sini meliputi tiga aspek. Desentralisasi administrasi, desentralisasi politik dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi yang krusial ini yang politik. Kalau kekuasaan

menunjuk orang itu masih di pusat, itu belum bisa dibilang desentralisasi. Kalau itu sudah di daerah, di situ proses meningkatnya akuntability, transparansi. Kalau dua ini meningkat maka korupsi akan menurun. Nah, ini juga, saya kaitkan sedikit, dengan munculnya aktor-aktor non pemerintah di dalam tubuh kepemimpinan daerah.

HB:

Siapa saja maksud anda, LSM atau?

AB:

Satu LSM. Dua kalangan bisnis. Karena mereka punya kekuatan finansial untuk bertarung dalam pemilu yang bebas ini. Mereka masuk dengan beban yang lebih ringan dibandingkan itu dari birokrasi atau dari partai-partai politik. Dan sekarang banyak kita saksikan orang-orang profesional atau pengusaha non birokrasi yang menjadi pemimpin-pemimpin di tingkat daerah.

HB:

Sebagian berhasil sebagian kalah ya.

AB:

Sebagian kalah, otomatis. Tapi saya melihat bukan saja institusinya yang berubah tapi komponen-komponen pengisi institusi itu juga berubah. Makanya dua pemilu ini mudah-mudahan *by the second open selection* ini kita akan melihat perubahan di tingkat daerah.

HB:

Anda kelihatannya nadanya positif bahwa masuknya kalangan LSM, masuknya kalangan bisnis mungkin guru dan sebagainya ke dalam itu, itu sesuatu yang positif menurut anda?

AB:

Ya karena begini salah satu problem menangani korupsi itu, pertanyaan mendasar yang dihadapi oleh orang-orang di dalam kekuasaan ini adalah; kalau saya melakukan langkah A saya akan berhadapan dengan siapa. Jadi orang menilai *policy* itu bukan begini, apakah *policy* ini baik untuk masyarakat. Tidak. Itu kan secara resmi di depan publik mengatakan begitu. Tapi di dalam benak yang sebenarnya ketika mengatakan saya akan melakukan langkah A, pertanyaan yang mendasar sekali, siapa yang akan menjadi musuh saya.

HB:

Bukan siapa yang diuntungkan siapa yang dirugikan.

AB:

Itu secara *teoritical* terbukti. *Empirical* terbukti. Hanya problemnya pemimpin tidak mau mengakui kalau itu diungkapkan. Jadi kalau presiden kita melakukan langkah apa, dia akan mikir sekali siapa yang akan jadi lawan saya. Jadi bukan ini lebih baik, itu lebih baik. Tentu saja dia mempertimbangkan itu tapi jangan dianggap cuma itu saja.

HB:

Atau jangan dianggap itu yang pertama.

AB:

Mungkin juga, siapa yang akan menjadi lawan saya kalau ini dilaksanakan. Nah, bayangkan orang yang tumbuh di dalam birokrasi

pemerintahan, tahu persis lika-liku proses korupsi, tahu persis kekuatan-kekuatan di tiap-tiap komponen maka ketika dia sampai di puncak, keberanian untuk melakukan langkah A, B, C, D lebih minim dibanding orang yang tahunya sedikit-sedikit.

HB:

Jadi berkah ketidaktahuan itu ada ya.

AB:

Ya. Berkah ketidaktahuan. Tapi juga menurut saya itu potensi. Jadi, tentu orang yang kehidupannya disokong dari proses korupsi KTP tentu akan siap memberikan perlawanan, membikin apa, karena uangnya dapatnya dari situ sehari-hari.

HB:

Kan juga dulu kita denger-denger melibatkan santet, dukun.

AB:

Misalnya begitu, konkrit itu. Kalau kita bicara korupsi jangan bicara wah ini jelek *therefor* semua orang akan diperangi. Tidak. Kalau kekuatan mereka besar, maka akan kalah orang yang memeranginya. Orang dari dalam itu lebih sulit untuk, jangankan untuk itu, untuk mengeluarkan slogan saja sulit. Kalau dari luar itu lebih mudah. Dan itu bukan hanya kasus di Indonesia, di banyak negara kalau menyangkut korupsi, orang luar itu lebih mudah.

HB:

Fresh from the oven atau *Fresh blood* ya. Nah, ini sekarang yang terakhir ya, sedikit saja. Anda bisa nggak bikin evaluasi singkat kondisi, atau *state of the arts* dari proses desentralisasi. Menurut anda bagaimana nih hubungannya dengan pemerintah pusat dan sebagainya.

AB:

Sekarang ini sudah berjalan empat tahun lebih desentralisasi. Itu terlihat ada *breakdown* di sisi servis sosial. Jadi pelayanan sosial masyarakat itu, kalau saya sebut *breakdown* itu mungkin terlalu ekstrim, ada penurunan kualitas di situ, pada tahap ini. Dan ini indikasinya paling mudah adalah munculnya epidemik, munculnya masalah-masalah kelaparan, *basic needs* yang menyangkut kesehatan, itu menurun sekali di banyak tempat. Ini adalah indikasi adanya penurunan di situ. Tapi di sisi pelayan publik non sosial servis ada kecenderungan peningkatan. Misalnya; pengurusan ijin usaha yang dulu beberapa hari, sekarang dijadikan satu, ada sistem pengurusan satu atap, ada inovasi-inovasi di sisi itu yang mana publik merasa membutuhkan. Tapi di sisi yang bentuknya sosial servis itu mengalami penurunan. Nah, penurunan di sosial servis itu biasanya tidak terasa sampai ada krisis. Sementara pelayanan-pelayanan yang modelnya demokrasi itu cepat publik bisa merasakan. Jadi saya katakan ini *moving forward*-nya positif tapi ada pelayanan-pelayanan sosial masyarakat yang perlu *improvement* secara serius. Yang lainnya sudah lebih baik.

HB:

Tahun depan lima tahun ke depan saya harapkan Anda, karena Anda juga direktur penelitian di Indonesian Institute, saya harap lembaga anda melakukan penelitian bagaimana desentralisasi setelah lima tahun.

AB:

Ini dimasukkan agenda terima kasih. Waktu habis bung Anies. Inilah akhir dari Forum Freedom pagi ini, kita berjumpa lagi minggu depan. Wassalam.